

PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI REKONSEPTUALISASI SYSTEM SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH

Mohsi

STAI Miftahul Ulum Pamekasan

E-mail: silamohsigmail.com

ABSTRACT

Marriage registration is often the subject of discussion among academics in the aspect of legal legitimacy. Is marriage registration a condition of marriage, or the harmony of marriage ?. From all the discourses available, the writer concludes that the recording of marriage in the al-maslahah review is a new witness system, but cannot replace the position of the witnesses who have been introduced and patented in the construction of classical texts and fiqh. its existence is only as complementary, but it is very mandatory to be fulfilled because it impacts on aspects of marriage, both directly and indirectly, such as to the status of the child on a birth certificate, divorce, and other aspects as a result of a marriage, also divorce.

Keywords: *Marriage Registration, Reconciliation of Witnesses, Maslahah.*

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan sering kali menjadi perbincangan kaum akademisi dalam aspek legitimasi hukum. Apakah pencatatan perkawinan sebagai syarat dari perkawinan, atau rukun dari perkawinan?. Dari sekian diskursus yang ada, penulis menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dalam tinjauan al-maslahah merupakan system saksi baru, tetapi tidak dapat mengganti posisi keberadaan saksi yang telah diintrodusir dan dipatenkan dalam konstruksi nash dan fiqh klasik. Keberadaannya hanyalah sebagai komplementer, tetapi sangat wajib terpenuhi karena berdampak pada aspek-aspek perkawinan, baik secara langsung maupun tidak, seperti kepada status anak dalam akte kelahiran, perceraian, serta aspek-aspek lain sebagai akibat dari sebuah perkawinan, juga perceraian.

Kata kunci: *Pencatatan Perkawinan, Rekonseptualisasi Saksi, Maslahah.*

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan, memang menjadi diskursus yang tidak akan pernah ada keringnya, selain karena factor legal normatif hukum Islam *ansich* yang tidak secara tersurat menyebutnya, juga dalam perspektif skeptic-prajudice merupakan produk hukum yang secara peraturan perundang-perundangan ada unsur eksploitasi hukum, sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aturan pencatatan perkawinan akan semakin besar dan berkembang sesuai dengan analisis-analisis para pakar hukum Islam. Pencatatan perkawinan pada dasarnya bukan materi hukum yang patut untuk dipersoalkan, karena secara procedural hal tersebut dibutuhkan, untuk memastikan bahwa ada dua pasang laki-laki dan perempuan telah melakukan perkawinan, yang dalam

ilmu administrasi pembukuan bias disebut sebagai bentuk sikap administratif, apalagi didunia yang semakin canggih seperti sekarang ini.

Persoalan yang muncul dari penting atau tidaknya aturan pencatatan perkawinan tersebut, nyatanya sangat banyak sekali. Apalagi, ketika dihadapkan pada sebuah negara yang berlandaskan negara hukum, seperti Indonesia ini. Contoh sederhana dari dampak tentang tidak adanya aturan pencatatan perkawinan adalah seseorang ketika didakwa bisa saja tidak mengakui atas statusnya yang sudah bersatus kawin, yang merambat dampak negatifnya tidak hanya pada internal keluarga saja. Tetapi, pada eksternal keluarga, apabila tidak mengakui statusnya karena ingin beristri lagi. Aspek yang perlu diperhatikan juga dari adanya aturan pencatatan perkawinan adalah tidak semua orang Indonesia mampu untuk membikin atau mengikuti aturan pencatatan perkawinan yang dimaksud, karena melakukan pencatatan nikah membutuhkan biaya (walaupun secara legal formal, digratiskan bagi yang tidak mampu), sementara orang yang berniat melakukan pernikahan, tidak semuanya terkatagori mampu secara ekonomi, sedangkan biaya pencatatan perkawinan bias dibilang lumayan mahal, belum lagi persiapan ekonomi pasca pernikahan masih belum menentu. Itulah mengapa, pencatatan perkawinan masih perlu adanya diskursus antara menumbuhkan kemaslahatan hukum atau merupakan ekplotasi hukum perkawinan.

Dampak sosial lainnya dari perkawinan tidak dicatatkan adalah anggapan sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia atau digerebeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinanya.¹ Selain itu dari sector keperdataannya suaminya tidak bertanggung jawab atas kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan

¹ H Endang Ali Ma'sum, 'Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya', *Mus ,,wa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12.2 (2013), 208.

hukum perkawinan.² Dalam kajian tentang pembukuan nikah yang dipaparkan dalam jurnal ini adalah menggunakan pendekatan kajian pustaka yang merupakan bagian dari kualitatif *reaserch*, dengan menggunakan metode analisis data atau *contens analysis*. Dimana kajian ini memusatkan kepada teks-teks yang berkaitan dengan regulasi pembukuan nikah dan konsep-konsep ushul fiqh dan kaidah fiqh yang fundamental, yang keduanya merupakan standar dasar dalam pengkajian hukum Islam.

DIALEKTIKA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM FIQH ISLAM DAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

Islam dipercaya oleh penganutnya sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalannya, baik yang berkaitan dengan hubungan umat muslim dengan tuhan, maupun hubungan dengan tuhan. Persoalan demi persoalan, seperti sosial, budaya, politik, dan hukum, masyarakat muslim lebih mempercayai islam sebagai solusi dengan komposisi aturan dan hukum yang ada didalam Islam itu sendiri. Sehingga seringkali banyak ditemukan distorsi dan pemahaman yang bias, dikarenakan banyaknya pemahaman yang keluar dari maksud yang dibawa oleh Islam itu sendiri. pencatatan perkawinan sebagai contoh adanya diskursus dan pertentangan antar pemikir, akademisi dan yuris hukum Islam, lagi-lagi karena alasan bahwa aturan pencatatan perkawinan tidak menjadi aturan tertulis-eksplisit dalam teks nash al-Qur'an dan al-Hadits. Termasuk pula tidak juga tersurat dalam teks fiqh klasik. Sehingga tidak heran, ketika formulasi pencatatan perkawinan menjadi regulasi sebuah Negara, akan mendapatkan sambutan yang beragam. Dan yang paling santer adalah sambutan yang kontra terhadap aturan tersebut.

Dalam fiqh klasik yang notabannya adalah derivasi Islam, pencatatan perkawinan tidak sama sekali disinggung. Sedangkan fiqh klasik sudah menjadi hukum yang hidup dan memiliki posisi strategis dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karenanya, tidak menutup dugaan bahwa maraknya perkawinan sirri dan tidak dicatatkan karena faktor pemahaman masyarakat atas pencatatan perkawinan itu sendiri, yakni bukan aturan yang dimuat dalam fiqh klasik, dimana fiqh klasik merupakan aturan yang secara sukarela ditaati oleh mayoritas

² Ma'sum. 208.

umat muslim di Indonesia. Disamping tidak adanya sosialisasi dari pihak birokrat yang bertugas untuk mengenalkan sekaligus pemahaman aturan pencatatan perkawinan kepada masyarakat.

Pemahaman yang amat luar biasa tentang hukum ini, menjadikan fanatisme madzhab menjadi satu-satunya alasan mengapa setiap ada pembaharuan hukum seringkali mendapat sambutan sinis dan reaktif dari pemikir hukum, utamanya yang masih memiliki pandangan yang konservatif terhadap sebuah realitas dan aturan hukum. Termasuk juga sambutan masyarakat yang konservatif atas pencatatan perkawinan ketiga dibawa ke ranah diskusi. Tetap yang menjadi soal, berkisar pada persoalan tidak tertulis dan tertulis dalam nash dan fiqh klasik, sebagai pijakan masyarakat dalam bermadzhab.

Pencatatan perkawinan dalam diskursus fiqh Islam justru tidak hanya dibidik karena persoalan tidak tertulis atau tertulis dalam nash dasar daripada Islam. Tidak pula alasan yang meninabobokkan kemajuan berfikir, yaitu karena tidak adanya ketentuan dalam fiqh klasik, atau alasan karena mayoritas madzhab besar tidak membicarakan bahkan tidak membahas tentang tetek bengik pencatatan perkawinan. Akan tetapi universalitas dan kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat, justru menjadi tolak ukur utama dalam menyikapi adanya aturan pencatatan perkawinan. Sehingga mandek dan kejumudan hukum Islam tidak menjadi ancaman benalu terhadap Islam itu sendiri dalam sector hukum perkawinan, dimana hukum perkawinan terkategori sebagai hukum yang ada unsur *mutghayyiratnya*, disamping memuat aturan yang *tsbuthiyahhnya*.

GENEALOGI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.

Hukum keluarga Indonesia merupakan cabang dari hukum perdata yang komposisinya sebagai wujud untuk mencapai keadilan, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hak insani, kesetaraan dan kemerdekaan pribadi. Maka, dari itu susunan dan materi hukum keluarga sedapat mungkin menghilangkan bias-bias hukum, yang berakibat pada

ketidakadilan, baik ketidakadilan gender³, maupun ketidakadilan karena persoalan kasta, dan persoalan finansial. Paradigma hukum dalam pandangan umum harus memberikan kemaslahatan kepada subyek hukumnya, dan kemaslahatan tersebut mampu mengekspresikan segala persoalan yang dirasa harus tercapai demi keadilan bagi subyek hukum tersebut. Hukum keluarga yang menjadi pijakan hukum di Indonesia, tidak bisa ditutup-tutupi, bahwa ada banyak materi-materinya yang masih terkesan buatan belanda, apalagi bukti praktis BW masih sangat sulit untuk dilepaskan dari produk hukum keluarga di Indonesia. Makanya, sumber-sumber hukum keluarga masih tidak bisa lepas dari produk hukum hindia belanda, walaupun secara yuridis, sudah jelas-jelas lepas dari kangkangan kolonealis belanda, baik secara ideologi maupun secara teritori.

Aturan tentang pencatatan terhadap kegiatan keperdataan merupakan konstruksi yang bisa dikategorikan sebagai baru, yang keberadaannya tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut adanya aturan tersebut. Hal demikian, tidak berarti bahwa konstruksi hukum pencatatan perkawinan dan perceraian merupakan hal yang menyalahi aturan awal dari hukum perkawinan dan perceraian. Apalagi, ada sebuah kaidah yang memberikan peluang untuk memunculkan aturan baru, yang sebelumnya tidak sama sekali ditemukan dalam aturan bakunya. Hal demikian karena aturan-aturan baku atau nash yang mengatur hukum perkawinan, tidak secara eksplisit mengaturnya, sementara problema yang mengiringi kehidupan masyarakat terus mengalami dinamisasi secara cepat dan berkembang.

Secara implisit nash al-Hadits memberikan rambu-rambu yang sifatnya substantif tentang pencatatan perkawinan itu sendiri, salah satu yang sering dipakai untuk melegitimasi adanya aturan pencatatan perkawinan adalah hadits yang berbunyi *glinu al-nikah walau bidarbi al-dhufuf*, hadits ini secara teks merupakan sebuah seruan untuk melakukan kegiatan persaksian terhadap sebuah kegiatan perkawinan. Bahkan sangking pentingnya unsur persaksian dalam pernikahan, dengan sangat sederhana

³Kesetaraan gender adalah suatu nilai modern yang baru belakangan ini mulai melekat pada kosepsi umum tentang keadilan dengan berkembangnya wacana hak insani dan feminisme (Ziba Mir-Hosseni, Dkk. Hukum Keluarga Islam dan Sosial Kesetaraan. Dalam. Reformasi *Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: LKis, 2017). 1. Jika ditilik secara mendalam melalui kacamata fiqh, konsepsi tentang kesetaraan gender merupakan persoalan *nazila* atau *mas'ail mustahdatsa*. Sehingga tak memberikan sekat pada pola pikir para akademisi untuk melakukan diskusi-diskusi dengan tema gender, dengan sudut pandang yang beragam.

sekalipun penting untuk dilakukan, sebagaimana bunyi hadits tadi. Terlepas dari alasan-alasan yang memicu tidak adanya pencatatan perkawinan di masa awal Islam. Aturan ini merupakan hal yang baru dalam Islam, sehingga hukum Islam sangat dibutuhkan untuk menyikapi persoalan yang kontemporer tersebut.

Dalam tatanan hukum positif yang ada di Indonesia, aturan pencatatan perkawinan merupakan bentuk ambivalensi dan paradoksikal antara rukun nikah atau aspek hukum yang lain. Paradoksikal ini menjadikan sebuah kepastian hukum belum jelas dan terkesan masih sangat ngambang. Dalam berbagai penelitian, banyak sekali yang menyimpulkan tentang status hukum pencatatan perkawinan, ada yang mengatakan masalah ada pula yang menyimpulkan sebagai komplementer. Dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa aturan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini. Bagaimanapun legitimasi masyarakat atas pencatatan perkawinan. Namun, fungsinya perlu juga diketahui, yaitu:⁴ *Pertama*: Sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melaksanakan perkawinan. *Kedua*: Memudahkan para pihak dalam tindakan kontrolir terhadap pelaksanaan Undang-Undang perkawinan di sebuah negara. *Ketiga*: Memiliki value hukum normatif yang bersifat imperative, dengan pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan legal atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara. *Keempat*: Dengan asas legalitas (pencatatan perkawinan) diharapkan bisa menekan adanya perkawinan dibawah tangan (nikah sirri).

VIS A VIS NORMATIVITAS DAN INFORMALITAS PENCATATAN PERKAWINAN.

Pembentukan sebuah undang-undang sebagai instrument hukum tidak serta merta berdiri sendiri, melainkan harus berpijak pada aturan dasar termasuk berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dalam UU No 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi a

⁴ Shofiyah Shofiyah, 'Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2014), 113.

kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. dalam dasarnya yang termuat dalam UU No 12 tahun 2011 Pasal 6 sebuah aturan perundang-undangan juga harus memuat sifat mengayomi, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan dan keserasian hukum.

Secara regulatif, aturan pencatan perkawinan telah disahkan dan menjadi undang-undang dengan No 22/1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang sebelumnya hanya diundangkan pada masyarakat pulau jawa dan Madura, yang kemudian berlaku secara nasional setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 1954. Dalam undang-undanga yang memuat hirarki perundang-undangan di Indonesai yakni UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam dictum konsiderannya bahwa adanya aturan adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NKRI tahun 1945⁵.

Dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat hirarki peraturan perundang-undangan yang memposisikan undang-undang berada dalam posisi yang ketiga secara kekuatannya. Hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 1 UU No 12 tahun 2011. Maka, dapat dikatakan UU Pencatatan perkawinan merupakan rumusan hukum yang secara normative menjadi aturan yang mesti ditaati oleh bangsa Indonesia. Secara positifisme hukum UU Pencatatan perkawinan menjadi aturan yang memiliki kekuatan atau juga disebut sebagai instrument hukum yang imperatif, artinya memiliki sifat keharusan untuk dilaksanakan oleh subyek hukumnya. Kekuatan UU Pencatatan Perkawinan No 22 tahun 1946 secara kekuatannya ada di urutan nomor tiga setelah UUD dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi, dalam dalam lingkup rumpun perundangannya, UU Pencatatan perkawinan memiliki kekuatan yang mandiri. Sehingga

⁵ UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

secara supremasi hukum dibidang pencatatan perkawinan, UU No 22 tahun 1946 sangat kekuatan yang mengikat.

Di lain pihak, pencatatan perkawinan juga disebutkan secara tersurat dalam pasal 2 ayat 2 UUP No 01/1974: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini juga dimunculkan dalam derivasi UU perkawinan, yaitu dalam Inpres No 01 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, dimana pasal 5 KHI menyebutkan: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Oleh karenanya amanah undang-undang pencatatan perkawinan yang sudah umur 73 sudah sangat jelas konsistensinya.

Dalam kasusnya, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mengetahui dan mengikuti regulasi pencatatan perkawinan, terbukti masih maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan alias kawin bawah tangan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya pemahaman bahwa persoalan perkawinan bukan bagian dari aturan hukum yang mesti diatur oleh Negara. Akan tetapi, masih dipercaya sebagai sebuah kegiatan yang bersifat ubudiyah dan aturan yang masih dipakai oleh masyarakat adalah hukum fiqh yang diyakini sebagai aturan yang memiliki kekuatan di atas Undang-undang Negara. Sehingga masyarakat masih bersikukuh bahwa perkawinan itu cukup berdasar agama yang ketentuannya ada dalam fiqh klasik. Artinya, masyarakat Indonesia masih memhami bahwa pernikahan akan menjadi legal apabila syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, berdasarkan ketentuan agama yang termuat dalam fiqh klasik. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan masih terkesan sebagai instrument hukum pelengkap dan formalitas belaka.

Ketika implementasi pencatatan perkawinan masih sangat jauh panggang dari api. Maka, instrument aturan pencatatan perkawinan yang terundangkan dengan no 22 tahun 1946 terkesan fakultatif, artinya hanya menjadi suka-suka atau menjadi aturan yang memiliki sifat pilihan, yang tidak diwajibkan untuk diikuti oleh subyek hukumnya, yang terjadi kemudian, undang-undang pencatatan perkawinan menjadi lepas dari maksud, asas, dan tujuan dibentuknya sebuah undang-undang artinya

keberadaan aturan tersebut tidak berdampak pada peristiwa perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan itu sendiri secara sistematis.

Apakah persoalannya bersifat regulatif, atau malah ada persoalan lain atas tidak berjalannya pencatatan perkawinan secara baik ditengah kehidupan masyarakat tersebut?. Dalam pandangan penulis. Ada poin-poin yang dapat disampaikan dalam tulisan ini. *pertama*: regulasi yang sudah sangat tua, yakni umur di atas 70 tahun. yang secara kajian kedayagunaan hukum dan kekuatan hukum sudah *expired*, artinya UU Pencatatan perkawinan sudah lepas dari zamannya. Apalagi aturan tersebut terkonstruksi pada masa orde lama, yang secara politik sudah mesti ada perubahan dan judicial review. *Kedua*: dilihat dari substansinya, UU No 22 tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, masih sangat sederhana, terkesan pengkajian dan proses legislasinya tidaklah tajam dan mendalam. Sehingga terkesan adanya rumusan hukum yang bersifat terburu-buru dan hanya sebagai pengisi kekosongan hukum saja, dan bersifat sementara. *Ketiga*: dilihat dari system sanksi yang diterapkan, sangat jelas bahwa aturan tersebut “pada saat ini” sudah tidak memiliki kekuatan dan legitimasi dari subyeknya. Karena system sanksi yang diterapkan sangatlah kecil yang secara daya ekonomi pada saat ini sudah tidak lagi dipakai yaitu kisaran 100 rupiah dan 50 rupiah. Maka dari itu, bisa saja sikap apatis akan muncul dari masyarakat terhadap UU pencatatan perkawinan yang diakibatkan muatan sanksi yang ada dalam UU Pencatatan perkawinan tersebut. *Keempat*: sejauh pengamatan penulis, lemahnya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait aturan tersebut. Sehingga, bisa saja ketiga persoalan yang disebutkan di atas bukanlah persoalan yang sesungguhnya. Akan tetapi, dari aspek menegerialnya, yaitu departemen agama atau menteri agama. *Kelima*: bisa saja dalam kementerian agama, tidak adanya tupoksi tentang sosialisasi, sehingga tidak dapat disalahkan adanya pengabaian atas sosialisasi tentang pencatatan perkawinan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena asumsi-asumsi di atas, maka aturan pencatatan perkawinan masih terkesan informal semata, dalam artian informal hanya bersifat komplementer dan pelengkap saja dalam kegiatan perkawinan. Maka, adanya dekonstruksi atau rekonstruksi aturan pencatatan perkawinan yang baru sangat diperlukan dan mendesak,

sehingga konsistensi, kedayagunaan, dan kekuatan hukumnya terjamin berdasarkan UU No 12 tahun 2011 dan semangat kemaslahatan hukum.⁶

KONSEPTUALISASI PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH.

Konstruksi fiqh perkawinan, secara tersurat telah dipaparkan tentang syarat-syarat berlangsungnya sebuah perkawinan, diantaranya adalah adanya saksi. Keberadaan saksi menjadi momok penting dalam perkawinan, karena berimplikasi pada batalnya sebuah perkawinan apabila menijhikan adanya saksi. Ketentuan adanya saksi tersebut sebagai turunan dari perintah nash syar I, dimana para mujtahid melakukan analisis teks atas ketentuan perintah saksi yang ada dalam sebuah hadits nabi.

Dalam pemahaman pemikiran Islam, persaksian menjadi hal yang wajib karena beberapa alasan, yaitu: a) pernikahan berkedudukan sebagai perbuatan yang suci dalam Islam dalam rangka mengatur maslahat dunia dan agama. Sehingga menjadi sangat penting adanya penyiaran, persaksian kepada khalayak ramai sebagai bentuk prestise pada kedua mempelai. b) meminimalisir tersiarnya berita hoax yang sama sekali tidak baik bagi kehidupan sang calon dan untuk menguatkan perbedaan antara halal dan haram yang dapat mencegah adanya pengingkaran terhadap pernikahannya. c). Pernikahan bertalian dengan banyak sapek hukum, dimana pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua dan hak harta warisan.⁷

Dari aspek lainnya, pernikahan merupakan perjanjian yang diikat oleh adanya kesepakatan dan persetujuan kedua pihak. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu unsur penting, yang sekaligus sebagai penguat adanya perjanjian tersebut. Oleh karenanya, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. *Pertama*: syarat sahnya perjanjian. *Ketiga*: asas perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.⁸ Apalagi pencatatan perkawinan bertujuan agar ikatan pernikahan menjadi jelas dan

⁶ Mohsi Mohsi, 'Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk', *Reflektika*, 13.1 (2018), 110.

⁷ Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah SOLUSI* 11.04 (2015), 25.

⁸ Trusto Subekti, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38.333-335.

mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.⁹ Tentu dalam rangka menjaga kesucian dan martabat perkawinan, termasuk menjaga hak-hak kedua belah pihak agar tidak terjadi penyelewangan.

Damanhuri yang dikutip oleh Dyah Ochtorina Susanti,¹⁰ menyebutkan tentang mafaat perjanjian yaitu *Pertama*: faidah bagi kehidupan suami istri, berupa kebebasan berkontrak, penegakkan keadilan, peningkatan kualitas kerja, dan meningkatnya taraf ekonomi keluarga; *Kedua*: Manfaat pada masalah penyelesaian sengketa hukum keluarga di lembaga peradilan, seperti efesiensi waktu, ketika ada yang bersengketa terkait perjanjian. Maka tidak perlu adanya pembuktian tambahan baik terkait harta bersama dan lainnya, cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat diawal pernikahan. Manfaat lain dari perjanjian adalah menghemat biaya. Artinya hal yang termaktub dalam perjanjian, tidak perlu dipersengketakan dalam perkara peradilan, sebab keduanya telah sepakat pada isi perjanjian. Apabila kedua belah pihak menghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan bersamaan dengan sengketa perceraian. Manfaat inilah yang didapatkan oleh keluarga, tetapi tidak semua keluarga melakukan langkah-langkah perjanjian ini, sebab dalam perkawinan tidak semua seseorang melakukan perjanjiannya hingga pada persoalan yang rijid.

Dalam beberapa penelitian telah disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat dan rukun sebuah perkawinan. Shofiyah menyimpulkan bahwa baik secara syar'i maupun UUP No 01/1974 tentang Perkawinan, bahwa keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sedangkan pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan dan menjadi hal yang sangat penting sebagai legalisasi perkawinan secara hokum negara dengan melihat nilai-nilai manfaatnya, sehingga tidak adalagi pihak-pihak yang dirugikan dari sebuah pernikahan.¹¹

⁹ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, 'Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4.02 (2016). 176.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, 'Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 1-30. 24.

¹¹ Shofiyah. Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 117.

Dalam tinjauan al-maslahah, keberadaan pencatatan perkawinan bisa terkategori sebagai hasil ijtihad baru yang disebut sebagai buah dari produk *al-maslahah mursalah*. Kerangka ushul fiqh telah memberikan studi terkait al-maslahah mursalah, yang masalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit tertuang dalam dalil qoth i.¹² meskipun keberadaan masalah mursalah menjadi debatebel. Namun, banyak sekali hasil keputusan sebuah produk hukum mengacu kepada konsep al-maslahah tersebut.

Ditinjau dari konsep al-Maslahah, pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting karena beberapa hal. *Pertama*: pencatatan perkawinan mengantisipasi terjadinya pemalsuan identitas kedua mempelai. *Kedua*: adanya legalitas dan legitimasi yang bersifat dokumen, dalam rangka menguatkan identitas kedua mempelai. *Ketiga*: memperkecil terjadinya ketidak pastian hukum antara kedua mempelai. *Keempat*: dengan adanya pencatatan perkawinan, perihal-perihal lain yang berhubungan dengan perkawinan dapat terjamin, apalagi yang bersangkutan berada dalam Negara yang berideologi hukum, seperti Indonesia. *Kelima*: dalam aspek keturunan, atau anak yang dihasilkan dapat diakui dan tercatat sebagai anak kedua mempelai, dimana seorang anak dalam Negara yang menganut system tertib administrasi akan diwajibkan memiliki akte kelahiran yang didalamnya terdapat kolom orang tua, yang apabila pernikahannya tidak dicatatkan. Maka, yang tampil dalam akte kelahiran tersebut hanya nama ibu saja, atau yang terbaru yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini berdampak kepada anak dan psikologi anak secara tidak langsung, termasuk ketika dilingkungan sekolah saat bersama teman kelasnya. Tidak menutup kemungkinan adanya bullying dari teman-temannya.

Dalam konsep istishlah imam al-Ghazali, yang dikutip oleh Zaki bahwa standart al-Maslahah sebagai berikut: ¹³*Pertama*: memiliki satu visi dengan semangat syariat atau prinsip syariah. *Kedua*, terkategori mendesak atau sangat butuh yang menempati kedudukan dharurat (adapun maslahat yang sifatnya tertier tidak dapat dijadikan landasan dan dalil hukum Islam, kecuali ada dalil spesifik yang menunjukkannya).

¹² Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum." dalam *Suhuf* 24. 1, (2012)." (2013), 15

¹³ M Zaki, "Formulasi Standar Masalahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)." *Al-Risalah* 13.01 (2018), 44.

Ketiga, memenuhi kriteria dharurah, kulliyyah (universal) dan qath'iyah (pasti), artinya tidak karena kepentingan tendensius dari seorang mujtahid atau pemberi fatwa, serta kemaslahatannya tidak didasarkan oleh prejudice belaka. Meskipun begitu, kemaslahatan selalu memiliki sifat relatif dan bertempo. Artinya, sesuatu yang dipandang masalah oleh camp tertentu, belum tentu dipandang masalah pada konstruk sosial tertentu.¹⁴

Abdul Wahab Khalaf, memberikan standart al-maslahah sebagai berikut: *Pertama*: Kemaslahatan itu harus bersifat nyata dan tidak boleh berdasar pada sangkaan belaka. *Kedua*: Berlaku universal dan menyeluruh untuk semua lapisan dan bukan untuk kepentingan personal atau kelompok parsial semata. *Ketiga*: dalam ihwal penyusunan hukum atas dasar kemaslahatan jangan sampai bersinggungan dengan pengelolaan hukum dan prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Begitu juga Wahbah al-Zuhailly yang dikutip oleh Aminuddin Salamet Widodo yang menyimpulkan bahwa masalah harus bersifat hakiki bukan berlandaskan pada anggapan kuat, akan tetapi masalah harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ihwal substansinya, masalah harus memiliki kekhasan umum, artinya bukan karena sebab kepentingan kelompok.¹⁶

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang terpenting dan menjadi tuntutan untuk dijadikan regulasi sebagai komplementer adanya persaksian dalam sebuah pernikahan. Tetapi, tidak menjadi rukun yang menyebabkan kalau tidak ada pencatatan pernikahan, akan menjadi batal sebuah akad pernikahan. Melainkan sebagai komplementer yang sifatnya menyempurnakan kepada akad nikah itu sendiri. karena sifat dari pencatatan perkawinan adalah komplementer yang wajib. Maka keberadaanya boleh dilakukan sebelum, ketika, atau sesudah pelaksanaan sebuah akad nikah. Dalam tinjauan *al-maslahah*, pencatatan perkawinan masuk dalam masalah yang sifatnya hajiyat, yang kemudian menjadi wajib dalam memenuhinya karena bertalian dan berantai dengan aspek-aspek lain dalam pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam aspek kepentingan anak dalam pembuatan akte kelahiran dan

¹⁴ Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 12.1 (2014), 68.

¹⁵ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Usûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al- Dâwah al- Islâmiyyah, 1990, 1967, 86-87.

¹⁶ Aminudin Slamet Widodo, *Konsep masalah mursalah Wahbah Zuhailly relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012, IX.

kepentingan-kepentingan lain, seperti pengurusan perceraian kalau kedua pihak terjadi perselisihan yang berakibat pada perceraian.

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu antisipasi terjadi kemudharatan dan kerugian diantara kedua pihak dalam keluarga, meskipun sebenarnya, perkawinan tanpa dicatatpun sudah dapat disaksikan oleh sakralisasi agama. Akan tetapi, dalam menjaga harga diri, menjaga keturunan, menjaga harta yang merupakan bagian dari maqoshid al-syariah perlu adanya regulasi, dan aturan yang sistematis dari sebuah Negara. Karena setiap manusia akan patuh terhadap sebuah ajaran agama juga ditopang oleh kekuatan sebuah Negara.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan merupakan rekonseptualisasi system saksi dalam sebuah perkawinan. Tetapi, keberadaanya tidak dapat mengganti posisi saksi yang telah terlegitimasi dalam nash al-Qur an dan al-Hadits. Hanya saja, sifat dari pencatatan perkawinan sebagai system saksi adalah sebagai komplementer yang keberadaanya menjadi penyempurna terhadap sebuah akad perkawinan. Dalam aspek kemaslahatan, pencatatan perkawinan sudah memenuhi standart daripada tujuan syariah, utamanya dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harga diri (*hifd al-Irdi*). Dengan pencatatan perkawinan, akibat-akibat buruk yang akan terjadi dapat diantisipasi dan terminimalisasi. Hal ini bukan untuk kriminalisasi pernikahan dan proteksi berlebihan dari sebuah pernikahan, tetepi dalam rangka untuk mencapai tujuan pernikahan itu sendiri yakni sebuah ikatan pernikahan yang *mitsaqon ghalidza* atau ikatan yang abadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, ‘Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits’, *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 4.02 (2016)
- Ma’sum, H Endang Ali, ‘Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya’, *Mus.,wa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12.2 (2013), 201–13
- Mohsi, Mohsi, ‘Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk’, *Reflektika*, 13.1 (2018), 84–104

- Shofiyah, Shofiyah, 'Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan', *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2014), 109–17
- Subekti, Trusto, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38
- Susanti, Dyah Ochtorina, 'Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 1–30
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum." dalam *Suhuf* 24. 1, (2012)." (2013).
- Zaki, M. "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustasfa)." *Al-Risalah* 13.01 (2018).
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 12.1 (2014): 63-74.
- Khallâf, Abd Wahab. Kairo: Maktabah al- Dāwah al- Islamiyyah, 1990
- Oyoh . "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1.04 (2015).
- Zuhailî, al-, Wahbah, *al-Wasit fi Ushul FIqh*, Dimasyqi: Matbaatt al-Islamiyat, 1967.
- Widodo, Aminudin Slamet. *Konsep maslahah mursalah Wahbah Zuhaili relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012